

Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun:

2 0 2 4



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media:	Radar Sampit	Halaman: 16
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	✓	Tabengan

# Evaluasi Kepatuhan LHP Penting untuk Belanja Daerah

## PALANGKA RAYA, PPOST

Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Wiyatno menghadiri kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tertentu Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 untuk lima Pemerintah Daerah (Pemda). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalteng pada Senin (15/1).

Wiyatno menjelaskan, hasil LHP tertentu kepatuhan atas belanja daerah memiliki peran penting dalam mengevaluasi kepatuhan belanja daerah di setiap daerah, khususnya di Kalteng. Ia menekankan catatan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi landasan evaluasi

yang berharga untuk perbaikan kedepan.

"LHP dengan tujuan tertentu yang disampaikan akan menjadi catatan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan atas belanja daerah, terutama bagi lima Pemda di Kalteng, guna perbaikan

ke depannya," ungkapnya, kemarin.

Tidak hanya itu, Wiyatno juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pembangunan daerah. "Semoga kerja sama dan sinergitas antara BPK RI dan Pemda, khususnya di Kalteng, dapat terus ditingkatkan," jelasnya.

LHP tertentu kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 dari BPK RI Perwakilan Kalteng telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Barito Utara, dan Lamandau.

Penyampaian LHP dengan tujuan tertentu, yang dilaksanakan

sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, bertujuan memberikan kesimpulan atas hasil pemeriksaan dengan eksaminasi atau pengujian.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, M Ali Asyhar menyampaikan, pandangannya terkait pemeriksaan tersebut. Ia menekankan aspek perencanaan dan pengadaan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Pemda perlu lebih memperhatikan aspek perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan, terutama dalam infrastruktur yang menggunakan alokasi anggaran tinggi," pungkasnya. (mma/P5)